

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Adami Chazawi. 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing
- Agus Santo, 2021, *Pandangan Filsafat Tentang Hukum, Moral & Keadilan*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2011)
- Alfitral. 2012. *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Penebar Swadaya Group.
- Ali Zaidan, "Menuju Pembaruan Hukum Pidana", (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)
- Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984)
- . *Delik-Delik Tersebar di Luar KUH*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985)
- . *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986)
- . 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- . 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- . 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986)
- Barda Nawawi Arief, (2002), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Becker, G.S. (1968). "Crime and punishment: an economic approach", *Journal of Political Economy*, 76 (2), hlm.169 –217

- B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, (Cambridge University Press, 2001)
- Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressinda, Yogyakarta, 2010
- Edi Setiadi dan Kristian, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)
- Elwi Dani. 2014. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- EQ. RM. Surachman dan Jan S. Maringka, 2015, *Eksistensi Kejaksaaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika
- E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)
- Febby Mutiara Nelson, 2020, *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- F. Zimring dan R. Frase, 1980, *The Criminal Justice System*, Little Brown Company
- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Special Delicate)* di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika
- Hazel B. Karper. *Introduction to the Criminal Justice System*, second edition, (West Publishing Company, 1979)
- Hikmawati, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Jurnal DPR RI, Vol. 11, No. 2, November 2020, hlm. 201-220
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California

- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse, PA: Good Books, 2002)
- H. Zaena Asyhadie, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, Edisi Kedua
- Indrianto Seno Adji, 2011, *KUHAP Dalam Prospektif*, Jakarta, Diadit Media
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020
- Jan S. Maringka, 2019, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- John Rawls, 2019, *Teori Keadilan*, cet. 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Joko Sriwondo, (2020). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- , 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni
- Lukman Hakim, Eka Dewi Sartika Saimima, Aggreany Haryani Putri, 2020, *Penerapan Konsep Plea Bargaining, Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta
- Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)
- M. Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, 1993
- Mardjono Reksodiputro, *"Sistem peradilan pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"*, (Jakarta: UI Perss, 1993)
- , *"Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karanga Buku Ketiga"*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1997)
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005,)

- Micahel Tonry, 1996, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York
- M. Najih SH. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press
- M.P. Pagaribuan, 2016, *Hukum Pidana Khusus-Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Jakarta, Pustaka Kemang
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- , 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- , 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ketiga, Alumni, Bandung,
- Nia K. Winayanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, 2015.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznic. 2003. *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis
- PAF. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013
- Reda Manthovani, dkk, 2023, *Restorative justice terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, hlm. 50 (Lihat juga: L. Rasjidi and I. T. Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Binacipta
- , *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2002.

- , *"Sistem Peradilan Pidana Kontemporer"*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)
- , *Dilema Pembuktian Terbalik*, Kompas, Jakarta, 2011\
- Siswanto Sunarso, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah*, (Bandung: Mandar maju, 2005)
- , *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana," in Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015)
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sumaryono, E., & Sardi, M., *Etika & hukum: relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. Kanisius, Jakarta, 2002
- Syahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, (Jakarta: PNRI, 2003)
- Teguh dan Aria, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Victor M. Situmorang. 1990. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006)
- Yanuar, Purwaning M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi

Ahmad Jazuli, *Pembentukan Satuan Kerja Baru Pemasyarakatan Sdebagai Solusi Alternatif Mengatasi Overcrowded*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 597-612

Albert W, Alschuler, 1979, "*Plea Bargaining And Its History*", Columbia Law Review, Vol. 79 No. 1, hlm. 5.

Andik Prakasa,dkk., *Pengaruh Desain Kemasan Terhadap Kepuasan Pelanggan UMKN Sakukata.co Salatiga*, Jurnal Ilmiah Komputer Grafis, Vol. 14, No. 1, Juli 2021, hlm. 95-108

Ateng Syarifuddin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justicia Edisi IV. Hlm. 22

Black's Law Dictionary with Pronouncation. 1983. Minn West Publishing co. St. Paul.

Bentham, J. (1823). "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation - A New Edition", [Online], <http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>, hlm. 96

Buku I RPJM 2015-2019, poin 6.4, hlm. 6-51.

Denico Doly, *Wacana Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Penelitian Keahlian DPR RI, Vol. XIV, No. 21, 2022

Dr. M. Syamsa Ardisasmita. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta 23 Agustus 2006. Hlm. 4

Elizabeth Ghozali, Pemberantasan Korupsi dalam Kerangka Perspektif Politik Hukum Pidana, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* Volume 2 No. 1 September 2021, hlm. 96.

Esin Orucu, May 2008, *What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion*, Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 12, No.1, hlm.2.

Ester Sheren Monintja. (2020). "Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016". Jurnal Lex Crimen, Vol. 9, No. 2. Hlm. 98

- Faturohman, Laila Kurniawati dan Siti Milani, *Penerapan Restorative justice pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Indonesia*, Borobudur Law and Society Journal, Vol. 2, No. 6, 2023, hlm. 260
- Fransiska Avianti, "Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", (Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, 2008), hlm. 49
- Giovanni Aditya Arum, *Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektifs t. Thomas Aquinas dan Relevansinya bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*, Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 25
- Harnoko, A. Y., & Ratnawati, I. Y., *Asas Proporsional dalam Perjanjian Waralaba (Franchise)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 9
- Harvard Law Review, 1970, *The Unconstitutionality of Plea Bargaining*, Vol. 83, hlm. 1389
- Hazel B. Karper, 1979, *Introduction to the Criminal Justice System*, Second Edition, West Publishing Company, hlm. 185
- Humaira Afdini dan Amad Sudiro, *Urgensi Penanggulangan Over Capacity Lapas sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*, Jurnal Syntax Literate, Vol. 8, No. 11, 2023, hlm. 6823-6836
- Ibrahim Nainggolan. (2018). "Analisis Yuridis Pengembangan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Perikanan". Jurnal De Legalata, Vol. 3, No. 1. Hlm. 68.
- I Made Artha Rimbawa, 2021, *Kewenangan KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yustitia, Vol. 15, No. 2, hlm. 87
- Indah Sari. (2019) "Unsur-Unsur Delik Materiil dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No. 1. Hlm. 65
- Izzatu Shulhiya, *Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan*, Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 51
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Rreformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Komputer, 2008)
- John H, Langbein, 1979, *Understanding The Short History of Plea Bargaining* (Yale Law School: Faculty Scholarship)

- KuatPuji. Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3 (2012): hal. 4.
- Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, (Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996)
- Laporan Singkat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Jaksa Agung, Wakapolri dan Ketua KPK
- Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hal. 3.
- Makbul Mubarak.(2017). "Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Negara Hasil Korupsi." *Legal Opinion*, vol. 5, no. 3. Hlm. 2
- Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 1, 2009, hlm. 1002
- M. Ahsan Ridhoi, Tekan Biaya Penyidikan, Polri: Lebih Baik Kita Cari Kasus Besar, <<https://tirto.id/tekan-biaya-penyidikan-polri-lebih-baik-kita-cari-kasus-besar-cGbJ>>, diakses tanggal 2 Maret 2025
- Mashuri Anwar, Rini Fathonah, & Niko Alexander, *Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadila Thomas Aquinas*, Jurnal SASI, Vol. 27, No. 2, April-Juni 2021, hlm. 130
- Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003)
- M. Mashuri, *Teori Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Kepala Desa Dalam Melaksanakan Kebijakan Desa (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 66/Pid. Sus/Tpk/2015/PN. Sby)*, Jurnal MIMBAR YUSTITIA, Vol. 1, No. 1, hlm. 76
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, *Asas-Asas Hukum Penuntutan*, The Prosecutor Law Review, Vol. 1, No. 1, April 2023, hlm. 10
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD)

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta, hlm 7

Murpraptono Adhi S., *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara*, Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FH Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 917-918

Nasution, B. J., *Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 247-274.

Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, 2020, *Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, hlm. 374

Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, (Jakarta: Bina Aksana, Jakarta, 1981).

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Edward Omar Sharif Hiariej mengenai “Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi” Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 30 Januari 2012, hlm. 6.

Pratasis, S. O., *Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP*, Jurnal LEX ET SOCIETATIS, Vol. 2, No. 5, 2014, hlm. 57

Putra, S. D. E., *Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 27, No. 1, 2016, hlm. 54

Rahmat Ramadhani. (2020). “Peran Politik Terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional”. Jurnal Sosel, Vol. 1, No. 1. Hlm. 3

RB Budi Prastowo. (2006). “Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawab Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan MK RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006”. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 3. Hlm. 214

Resky Nur Amalia. 2016. *Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Hukum Pidana Universitas Hasanuddin. Hlm. 43

Rena Yulia, *Hakikat Pengembalian Kerugian Negara: Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 3, September 2018, hlm. 245-254

Seminar Nasional HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-59 dengan tema "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia", Jakarta 25 April 2012

Tim Penyusun, *Naskah Akademik Hukum Kontrak*, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, hlm. 121

Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), hal. 8

Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994)

Vieru Simona, *Aristotle'S Influence on the Natural Law Theory of st Thomas Aquinas*, The Western Australian Jurist,1, 2015, hlm. 120

Wahono, *Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati (Filsafat Moral Thomas Aquinas)*, Jurnal Filsafat, Seri 27, 1997, hlm. 55

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/ DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif